

INDOTEXTILES

The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



Perlu Langkah Cepat Pulihkan Industri TPT Nasional

Dalam 2 tahun terakhir industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tengah berada dalam tekanan besar yang berimbas pada 60-an perusahaan gulung tikar dan 250 ribu tenaga kerja di PHK. Harapan perbaikan bertumpu pada pemerintah baru, ditengah perbaikan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Meski publik melihat bahwa sedang ada perbaikan besar-besaran ditubuh birokrasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, kalangan tekstil tengah menunggu dan berharap ada langkah signifikan yang segera diambil Presiden Prabowo untuk memperbaiki sektor manufaktur padat karya yang masih menjadi andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan domestik hingga penghasil devisa ekspor.

Ditengah hiruk pikuk perang dagang dan kondisi geo politik yang menyebabkan tingginya hambatan ekspor, maka pasar domestik menjad tumpuan utama sektor TPT

nasional. Hanya saja permasalahan banjirnya barang impor khususnya importasi ilegal masih menjadi permasalahan klasik yang semakin mengganas.

Untuk mengatasi masalah ini maka kalangan tekstil sangat memerlukan intervensi Presiden Prabowo mengingat banyak pihak terlibat dan berkepentingan terhadap praktik ilegal ini. Untuk itu sebagai pemain disektor ini, mari kita bersama mendorong perbaikan dan tetap menyuarakannya agar pemerintah segera turun tangan menjalankan agenda pemulihan industri TPT Nasional.

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-84

Berita Utama

- Anomali Data Impor Tekstil: Tantangan Besar bagi Industri Dalam Negeri

Berita Terbaru

- UMKM Tekstil Bandung Sukses Raup Ribuan Pesanan Lewat E-Commerce
- Sinergi Industri Tekstil Melalui Ajang Badminton di Bandung
- Indonesia Tertinggal dari India dalam Regulasi Tekstil, Pengusaha Desak Penerapan SNI Wajib
- Inovasi Berkelanjutan untuk Industri Tekstil Indonesia
- Indonesia Perkuat Eksistensi Tekstil Berkelanjutan di Inggris
- Ancaman Serbuan Tekstil Impor terhadap Industri Dalam Negeri
- ASDP Dorong Daur Ulang Limbah Tekstil di Hari Peduli Sampah 2025
- Regulasi Impor yang Stagnan Perparah Konflik di Industri Tekstil
- Kemenkeu Sederhanakan Tarif Bea Masuk untuk Kemudahan Impor
- Pelindo Manfaatkan MUFFEST 2025 untuk Perluas Pasar

- Revisi Aturan Impor Tekstil, Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Industri Lokal
- Industri Tekstil Terpukul, Ribuan Pekerja Sritex Terkena PHK
- Luhut Pastikan Industri Tekstil Masih Punya Masa Depan

BERITA UTAMA

Anomali Data Impor Tekstil: Tantangan Besar bagi Industri Dalam Negeri



Industri tekstil dalam negeri tengah menghadapi tantangan besar, meskipun data statistik menunjukkan pertumbuhan yang tampak positif. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta, menyoroti adanya kejanggalan dalam data impor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan laporan resmi.

Salah satu faktor utama penyebab anomali ini adalah ketidaksinkronan dalam perhitungan konsumsi, yang masih didasarkan pada nilai uang tanpa mempertimbangkan volume barang yang dibelanjakan masyarakat. Redma menjelaskan bahwa meskipun nilai konsumsi mengalami penurunan, volume konsumsi

tetap tinggi karena didominasi oleh barang impor ilegal yang murah. Hal ini menghambat pertumbuhan industri tekstil dalam negeri.

Lebih lanjut, Redma mengungkapkan bahwa banyak barang impor ilegal masuk ke pasar tanpa tercatat dalam data resmi. Kondisi ini menyebabkan surplus dalam neraca perdagangan, menciptakan kesan pertumbuhan industri tekstil yang keliru. Barang impor ilegal yang tidak tercatat dianggap sebagai produksi lokal, padahal sebenarnya berasal dari luar negeri. Akibatnya, data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mencerminkan realitas industri tekstil yang tengah terpuruk.

Meskipun data BPS menunjukkan pertumbuhan industri tekstil dalam kuartal terakhir, realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Redma menegaskan bahwa penurunan industri tekstil masih berlanjut dan akan terus terjadi selama impor ilegal tidak ditangani dengan serius dan perhitungan data belum diperbaiki.

Para pengusaha tekstil berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap impor ilegal dan menyusun data dengan metode yang lebih akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi nyata di industri tekstil.

Sebelumnya, Redma juga mengungkapkan bahwa derasnya barang impor ilegal telah memicu deindustrialisasi dalam satu dekade terakhir. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri mengalami penurunan pertumbuhan akibat masuknya produk luar negeri secara masif.

Berdasarkan data yang dikutip dari ITC dan TradeMap, nilai ekspor TPT China ke Indonesia sepanjang 2019-2023 menunjukkan gap signifikan dibandingkan dengan data impor TPT Indonesia dari China untuk kategori HS 50-63. Dalam lima tahun

terakhir, diperkirakan sebanyak 72.250 kontainer impor TPT ilegal masuk ke Indonesia, menyebabkan potensi kerugian pendapatan negara sekitar Rp46 triliun.

Secara lebih rinci, nilai ekspor TPT China ke Indonesia berturut-turut pada tahun 2019-2023 adalah US\$5,09 miliar, US\$3,79 miliar, US\$5,86 miliar, US\$6,50 miliar, dan US\$5,28 miliar. Sementara itu, terdapat gap signifikan dari nilai impor TPT Indonesia dari China dengan selisih berturut-turut sebesar US\$1,12 miliar, US\$706,1 juta, US\$1,79 miliar, US\$2,12 miliar, dan US\$1,47 miliar.

Fenomena ini menegaskan bahwa tanpa langkah tegas dalam mengatasi impor ilegal dan memperbaiki sistem pencatatan data, industri tekstil nasional akan semakin sulit bertahan. Kebijakan yang lebih ketat serta sistem pengawasan yang lebih baik diperlukan agar industri dalam negeri dapat kembali berkembang dan bersaing secara sehat di pasar domestik.



BERITA TERBARU

UMKM Tekstil Bandung Sukses Raup Ribuan Pesanan Lewat E-Commerce



E-commerce terus menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, memberikan peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang. Laporan e-Conomy SEA 2024 yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat bahwa kontribusi e-commerce terhadap ekonomi digital Indonesia mencapai USD 65 miliar dan diproyeksikan terus meningkat hingga USD 150 miliar pada tahun 2030.

Salah satu pengusaha muda yang merasakan dampak positif dari e-commerce adalah Billy Noviar, pemilik Papastore.bdg, sebuah usaha tekstil asal Bandung. Berawal dari berjualan tote bag di Shopee pada tahun 2019, Billy dan tiga rekannya mengalami kesulitan dalam meningkatkan penjualan. Mereka pun melakukan riset pasar dan melihat peluang di industri Food & Beverages (F&B), hingga akhirnya memutuskan untuk beralih menjual apron di akhir tahun 2019.

Apron yang awalnya hanya dianggap sebagai produk pelengkap ternyata memiliki permintaan tinggi di sektor F&B. Namun, perjalanan bisnis Billy tidak selalu mulus. Setelah beberapa waktu, ketiga temannya memilih untuk berhenti menjalankan bisnis

bersama, meninggalkan Billy untuk mengelola usaha seorang diri. Dengan tekad kuat dan belajar secara otodidak, Billy mengembangkan Papastore.bdg dan fokus berjualan eksklusif di Shopee.

Keunikan produk menjadi salah satu kunci sukses Papastore.bdg. Alih-alih menjual produk yang umum di pasaran, Billy memilih untuk menawarkan apron khusus bagi barista, chef, bartender, dan pelayan dengan desain yang stylish dan fungsional. Tidak hanya menasar pembeli individu, Billy juga menerapkan strategi business-to-business (B2B) dengan menyediakan layanan custom pre-order di Shopee. Layanan ini memungkinkan pemilik usaha F&B mendapatkan apron eksklusif dengan logo dan desain sesuai identitas brand mereka, membantu bisnis kuliner memperkuat citra visual mereka.

Dengan strategi pemasaran yang tepat, Papastore.bdg kini mampu meraih ribuan pesanan setiap bulan. Peran kampanye Shopee dalam meningkatkan visibilitas toko juga sangat signifikan, bahkan dalam satu hari pesanan bisa mencapai lebih dari 300 unit.

Selain kesuksesan bisnis, Papastore.bdg juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan membuka lapangan kerja. Dari awalnya hanya memiliki tiga karyawan, kini Billy telah memperkerjakan lebih dari 50 orang, dengan lebih dari separuhnya merupakan ibu-ibu yang berperan penting dalam proses produksi.

Billy terus mengoptimalkan fitur-fitur Shopee seperti Iklan Shopee, program kampanye, dan Affiliate Marketing Solutions untuk meningkatkan penjualan. Bahkan, ia kini mulai mengeksplorasi fitur Shopee Live dengan menyiapkan studio dan talent khusus guna menjangkau lebih banyak pelanggan.

Shopee tetap berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, tidak hanya sebagai platform jual beli, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan inovasi dan program yang terus berkembang, e-commerce menjadi sarana yang efektif bagi UMKM lokal untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan dampak ekonomi yang nyata.

Sinergi Industri Tekstil Melalui Ajang Badminton di Bandung

Sebanyak 29 pelaku industri tekstil dan produk tekstil serta asosiasi dan perwakilan pemerintah menjalin kerja sama melalui ajang kompetisi badminton yang berlangsung sejak Sabtu hingga Ahad, 8-9 Februari 2025, di GOR KONI, Jalan Jakarta, Kota Bandung. Selain sebagai ajang olahraga, kompetisi ini juga bertujuan untuk menghimpun atlet badminton dari industri tekstil di seluruh Indonesia.



Ketua pelaksana The Textile Industry Badminton Tournament (TTIBT), Okta Sakti, menyampaikan bahwa puluhan pemain dari berbagai industri tekstil turut serta dalam turnamen ini. Acara ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mempertemukan pelaku industri dari hulu hingga hilir. Ia berharap kompetisi ini dapat menjadi bagian dari penguatan rantai pasok industri tekstil di Indonesia.

Okta menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antar pelaku industri serta memberikan dampak positif terhadap sektor tekstil nasional. Badminton dipilih sebagai cabang olahraga dalam kompetisi ini karena banyak pekerja industri tekstil yang memiliki keterampilan dalam olahraga tersebut. Tidak hanya para operator pabrik, pimpinan perusahaan industri tekstil pun turut berpartisipasi dalam ajang ini.

Ketua Ikatan Alumni ITT-STTT, Riady Madyadinata, mengungkapkan bahwa peserta kompetisi berasal dari industri tekstil yang tersebar di Jawa Barat hingga Jawa Timur dan memiliki skala nasional. Ia berharap kompetisi semacam ini dapat diadakan secara berkala setiap dua tahun sekali. Selain itu, ia juga mengusulkan agar pada edisi berikutnya, perwakilan industri dari negara lain seperti Malaysia dan Thailand turut diundang untuk meningkatkan jaringan kerja sama internasional.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Andrew Purnama, menekankan bahwa kompetisi ini menjadi momen penting untuk mempererat silaturahmi di tengah kondisi industri tekstil yang sedang menghadapi tantangan besar. Menurutnya, kolaborasi dan pertukaran pemikiran dalam ajang seperti ini diperlukan untuk memperkuat industri tekstil nasional yang tengah menanti kepastian regulasi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutannya.

Kompetisi perdana TTIBT yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan PT Trisula Textile Indonesia sebagai juara pertama, sementara posisi kedua diraih oleh PT Primatexco. Ajang ini diharapkan menjadi awal dari upaya membangun solidaritas industri tekstil melalui kegiatan olahraga yang juga membawa dampak positif bagi dunia usaha.

Indonesia Tertinggal dari India dalam Regulasi Tekstil, Pengusaha Desak Penerapan SNI Wajib



Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI)

kembali mendesak pemerintah untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi seluruh produk tekstil. Langkah ini dinilai penting guna melindungi industri dalam negeri dan menjadi strategi non-tarif untuk mengatasi defisit neraca perdagangan yang masih terjadi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil, menyebut bahwa Indonesia dapat belajar dari India dalam hal regulasi standar wajib untuk produk tekstil. India telah menerapkan Quality Control Order (QCO) yang dikeluarkan oleh Bureau Indian Standard (BIS), yang mewajibkan seluruh produk, termasuk tekstil, untuk memenuhi standar tertentu.

"India telah menerapkan standar wajib secara bertahap, dimulai dari serat, benang, dan kemungkinan kain di masa mendatang. Penerapan ini dilakukan secara sistematis, sehingga industri dalam negerinya patuh terhadap standar tersebut," ujar Farhan pada Jumat (14/2/2025).

Dengan adanya standar ini, India dapat mengendalikan produk impor yang berdampak pada defisit perdagangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi industri lokal untuk berkembang. Langkah ini

terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing industri tekstil dalam negeri.

Farhan menyoroti bahwa neraca perdagangan tekstil Indonesia juga mengalami defisit sekitar US\$2-3 miliar. Secara volume, Indonesia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, dengan harga produk impor yang jauh lebih murah akibat praktik dumping. Menurutnya, penerapan standar wajib dapat menjadi hambatan non-tarif yang efektif untuk melindungi pasar domestik dari gempuran produk impor murah.

Namun, penerapan SNI wajib hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Salah satu kendala utama adalah dominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam industri pakaian jadi. Kebijakan ini dinilai dapat memberatkan pelaku UMKM, terutama di tengah persaingan ketat dengan produk impor murah dan maraknya peredaran pakaian bekas.

"Kementerian Perindustrian akhirnya menarik usulan ini karena UMKM masih kesulitan bersaing, apalagi jika harus memenuhi standar SNI yang ketat," jelas Farhan.

Selain mendesak regulasi SNI wajib, APSyFI juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aturan pelabelan berbahasa Indonesia. Banyak importir yang tidak mematuhi aturan ini, bahkan beberapa hanya menempelkan stiker label yang mudah hilang. Hal ini menjadi celah bagi masuknya produk yang tidak memenuhi standar kualitas.

Persoalan ini turut menjadi perhatian Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI). Direktur Eksekutif YKTI, Ardiman Pribadi, menegaskan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam menegakkan aturan kewajiban

pelabelan berbahasa Indonesia dan SNI wajib.

"Aturan ini sangat penting bagi konsumen agar dapat mengetahui spesifikasi serta kualitas barang yang dibeli," ujar Ardiman.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2021 sebenarnya telah mewajibkan semua jenis pakaian dan kain yang beredar di Indonesia untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Namun, sejak aturan ini diberlakukan pada 2015, hingga kini masih minim upaya penegakan hukum yang serius.

Lebih mengkhawatirkan, penegakan hukum terhadap SNI pakaian bayi juga masih lemah. Produk yang seharusnya memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk bayi masih bebas beredar di pasaran, termasuk di platform online, tanpa memenuhi ketentuan SNI. Sayangnya, hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang.

YKTI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menegakkan aturan ini. Lemahnya penegakan hukum hanya akan merugikan konsumen, terutama dalam aspek keselamatan dan kualitas produk yang digunakan sehari-hari. Kejelasan regulasi dan ketegasan dalam implementasi kebijakan menjadi kunci agar industri tekstil Indonesia dapat bersaing secara global dan tidak semakin tertinggal dari negara lain, seperti India.

Inovasi Berkelanjutan untuk Industri Tekstil Indonesia

Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya sukses menggelar konferensi internasional dalam rangka penutupan proyek German-Indonesia ENA-Text. Acara ini

mempertemukan industri tekstil dan komunitas akademik untuk membahas solusi produksi berkelanjutan di Indonesia. Proyek yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Riset Jerman ini bertujuan mengembangkan pendekatan baru guna mengoptimalkan proses produksi, sehingga industri tekstil dapat menghemat energi hingga 40 persen melalui berbagai langkah seperti penyempurnaan, pewarnaan, dan penyelesaian akhir.

Dalam konferensi tersebut, Dr. Juliana Murniati dari Unika Atma Jaya menyoroti meningkatnya penerapan tarif tinggi terhadap bahan bakar fosil di berbagai negara sebagai respons terhadap isu perubahan iklim. Di Eropa, produk berbasis bahan bakar fosil dikenakan biaya lebih mahal, sementara industri tekstil global mulai menuntut rantai pasokan yang bebas karbon. Oleh karena itu, industri tekstil dan garmen di Indonesia perlu bersiap mengadopsi regulasi seperti European Green Deal agar tetap kompetitif di pasar internasional.

Selama empat tahun terakhir, proyek EnaTex telah meneliti peluang penghematan energi fosil bagi industri tekstil di Indonesia. Selain Unika Atma Jaya dan Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung, proyek ini juga melibatkan mitra industri seperti SriTex dan Harapan Kurnia. Di sisi Jerman, konsorsium terdiri dari lembaga penelitian IZES, University of Applied Sciences Niederrhein, serta perusahaan Brückner Trockentechnik GmbH & Co. KG dan Sunfarming.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai metode dapat diterapkan untuk meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil. Misalnya, bahan kimia fungsional dapat diaplikasikan secara minimal pada satu sisi dengan jumlah cairan sesedikit mungkin, sehingga mengurangi proses pengeringan dan menghasilkan efisiensi energi hingga 40

persen. Selain itu, penerapan sistem pewarna dengan tingkat fiksasi tinggi memungkinkan pengurangan jumlah air dan suhu rendaman pembilas, yang berkontribusi pada penghematan energi dan pengurangan emisi karbon dioksida hingga 25 persen per kilogram tekstil, terutama untuk warna gelap.

Saat ini, energi untuk mengeringkan tekstil masih banyak bergantung pada lignit dalam negeri dan menggunakan uap jenuh serta minyak perpindahan panas bersuhu tinggi untuk proses pencucian, pemutihan, pengeringan, dan pengikatan. Dengan hasil penelitian EnaTex, diharapkan industri tekstil Indonesia dapat beradaptasi dengan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan guna menghadapi tantangan global menuju produksi yang lebih berkelanjutan.

Indonesia Perkuat Eksistensi Tekstil Berkelanjutan di Inggris

Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya dalam industri tekstil berkelanjutan dengan berpartisipasi dalam pameran Source Fashion di Inggris. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London turut memfasilitasi sejumlah perusahaan tekstil nasional untuk menampilkan produk-produk unggulan dalam ajang fesyen berkelanjutan terbesar di Inggris dan Eropa tersebut.



Duta Besar RI untuk Inggris dan Irlandia, Desra Percaya, menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam Source Fashion yang berlangsung di London pada 18-20 Februari 2025 merupakan langkah strategis sekaligus menandai partisipasi pertama Indonesia dalam pameran ini. Ia menyampaikan bahwa dukungan negara terhadap industri tekstil nasional sangat penting mengingat peran sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap ekspor dan pendapatan domestik bruto (PDB), serta penguatan hubungan bilateral dengan Inggris.

Atase Perdagangan KBRI London, Ayu Siti Maryam, melihat peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk tekstil ke Inggris. Dengan status Indonesia sebagai salah satu dari 10 eksportir tekstil terbesar di dunia, potensi ekspor ke pasar Inggris semakin terbuka. Pada tahun 2024, nilai ekspor tekstil Indonesia mencapai sekitar US\$ 8,3 miliar (Rp 135,5 triliun), mencerminkan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam memperluas pasar global.

Dalam pameran ini, Indonesia diwakili oleh beberapa perusahaan terkemuka seperti PT Dan Liris, Dialesha Indonesia Global, PT Excellence Qualities Yarn, PT Nagamas Kurnia, dan PT Pan Brothers. Mereka menampilkan berbagai produk tekstil unggulan berbahan ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Tak hanya sekadar pameran, KBRI London juga mengadakan diskusi interaktif mengenai Indonesia sebagai sumber bahan tekstil dan garmen berkelanjutan, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak mitra bisnis potensial.

Kehadiran Indonesia dalam Source Fashion menargetkan potensi transaksi hingga US\$ 1,5 juta (Rp 24,4 miliar). Pameran yang dihadiri sekitar 30.000 pengunjung ini

melibatkan peserta dari 25 negara, termasuk Indonesia, yang seluruhnya telah melalui audit untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok mereka. Dengan langkah ini, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam industri tekstil global.

Ancaman Serbuan Tekstil Impor terhadap Industri Dalam Negeri

Industri tekstil dalam negeri menghadapi ancaman serius akibat



membanjirnya produk tekstil impor. Kondisi ini telah menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar dan berpotensi menghilangkan nilai ekonomi industri tekstil yang mencapai Rp 235 triliun per tahun. Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menyayangkan situasi ini, mengingat industri tekstil memiliki potensi besar dalam memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Sebagai contoh, bahan baku seperti PX (Paraxylene) yang dibeli seharga Rp 5.000 per 0,30 kilogram dapat diolah menjadi pakaian jadi senilai Rp 104.000 per kilogram, atau mengalami kenaikan nilai hingga 200 persen. Berdasarkan data APSyFI, konsumsi garmen domestik pada 2023 mencapai 2,26 juta ton, dengan nilai ekonomi industri tekstil diperkirakan sebesar Rp 235 triliun per tahun. Dengan bahan baku PX yang dibeli dari Pertamina sekitar 600.000 metrik ton per tahun senilai Rp 10 triliun, industri ini seharusnya mampu berkembang pesat.

Selain menciptakan nilai ekonomi yang besar, industri tekstil juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) sebesar 11 persen, potensi pajak dari industri ini bisa mencapai Rp 25 triliun per tahun. Belum lagi dari sektor impor kapas, yang pada 2023 mencapai konsumsi 611.550 metrik ton dengan harga beli Rp 31.000 per kilogram, memberikan potensi pajak tambahan sebesar Rp 18,95 triliun per tahun. Besarnya multiplier effect dari industri tekstil terhadap perekonomian nasional seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Namun, potensi besar ini terhambat oleh maraknya barang impor, baik resmi maupun ilegal, terutama pada produk kain dan garmen. Hal ini berimbas langsung pada sektor benang dan poliester, yang mengalami penurunan kapasitas produksi secara signifikan. Ketergantungan pada produk impor mengakibatkan pabrik-pabrik lokal kesulitan bersaing, bahkan banyak yang terpaksa menutup usahanya. Padahal, kapasitas produksi poliester dalam negeri sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jika situasi ini terus berlanjut, industri tekstil nasional berisiko semakin terpuruk, mengancam keberlangsungan ekonomi dan lapangan kerja di sektor ini.



ASDP Dorong Daur Ulang Limbah Tekstil di Hari Peduli Sampah 2025

Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada Jumat (21/2/2025), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng perusahaan pengelolaan limbah tekstil Pable untuk mendaur ulang setidaknya 100 kilogram seragam bekas karyawan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ASDP dalam mengurangi dampak lingkungan akibat limbah tekstil serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-12 tentang Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab.

Seragam bekas yang dikumpulkan berasal dari perubahan identitas perusahaan yang dilakukan pada 2023 bertepatan dengan HUT ke-50 ASDP. Proses daur ulang dilakukan melalui tahap penguraian serat (fiber processing) dan pemintalan benang (yarn spinning) hingga menghasilkan kain baru yang dapat dimanfaatkan kembali, termasuk untuk pembuatan seragam daur ulang bagi karyawan. Dengan metode ini, limbah tekstil yang sebelumnya dianggap tidak bernilai ekonomis dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat.

Limbah tekstil merupakan salah satu kontributor utama emisi karbon global. Menurut World Resources Institute, industri tekstil menyumbang sekitar 10% dari total emisi gas rumah kaca dunia. Oleh karena itu, upaya daur ulang yang dilakukan ASDP menjadi langkah nyata dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri ini.

Selain program daur ulang seragam, ASDP juga menjalankan berbagai inisiatif keberlanjutan lainnya. Hingga akhir 2024,

perusahaan ini telah mengumpulkan 1,72 ton sampah plastik melalui program Reverse Vending Machine (RVM), setara dengan 92.334 botol plastik yang berhasil didaur ulang. Program ini tidak hanya membantu mengurangi jejak karbon hingga 9 ribu kilogram, tetapi juga menyelamatkan 1.458 meter persegi ruang lingkungan.

Dengan berbagai langkah konkret ini, ASDP terus berkomitmen dalam mendorong praktik ramah lingkungan dan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.

Regulasi Impor yang Stagnan Perparah Konflik di Industri Tekstil



Industri tekstil nasional, khususnya di sektor hulu, tengah menghadapi tantangan besar akibat ketidakseimbangan kebijakan impor bahan baku chip untuk produksi benang poliester dan serat sintetis. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio, mengungkapkan bahwa perbedaan kepentingan dalam kebijakan ini tidak hanya menyulitkan pelaku industri dalam menjual produknya di pasar domestik, tetapi juga memicu perpecahan di antara asosiasi industri seperti Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI).

Sebagian pelaku industri mendukung kebijakan anti-dumping guna membatasi impor dan mendorong pertumbuhan industri lokal, sementara pihak lain khawatir bahwa

proteksi yang berlebihan justru akan menyebabkan kelangkaan bahan baku, yang pada akhirnya menghambat sektor hilir. Kondisi ini bahkan mendorong beberapa produsen besar menghentikan produksi poliester dan beralih ke impor bahan baku. Beberapa perusahaan yang sebelumnya beroperasi penuh dalam rantai produksi dari bahan mentah hingga produk jadi kini lebih memilih membeli chip impor ketimbang memproduksi sendiri.

Menurut Andry, situasi ini terjadi karena lemahnya kebijakan importasi yang tidak dikendalikan secara optimal. Ia menilai bahwa ketidakpastian regulasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah memperparah dilema industri. Jika impor dibiarkan tanpa proteksi, maka produsen lokal semakin terpinggirkan. Namun, jika impor dibatasi, pasokan bahan baku dalam negeri menjadi terganggu akibat banyaknya pabrik yang berhenti berproduksi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih seimbang agar industri tekstil nasional dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan global.

Kemenkeu Sederhanakan Tarif Bea Masuk untuk Kemudahan Impor

Kementerian Keuangan telah menyederhanakan tarif bea masuk bagi barang kiriman tertentu dengan mengurangi tarif Most Favored Nation (MFN) yang sebelumnya



bervariasi menjadi hanya tiga kategori, yaitu 0%, 15%, dan 25%. Langkah ini bertujuan

untuk mempercepat dan mempermudah layanan kepabeanan.

Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Kemenkeu, Chotibul Umam, menjelaskan bahwa sebelumnya delapan jenis komoditas, termasuk kosmetik, produk tekstil, dan alas kaki, dikenakan tarif MFN yang berbeda-beda. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2025, aturan bea masuk ini disederhanakan menjadi tiga kategori. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 5 Maret 2025.

Menurut regulasi terbaru, barang kiriman yang diberitahukan dengan Consignment Note dan memiliki nilai pabean lebih dari US\$3 hingga US\$1.500 akan dikenakan tarif bea masuk tertentu. Buku ilmu pengetahuan tetap dikenakan tarif 0%, jam tangan, kosmetik, serta besi dan baja masuk dalam tarif 15%, sementara tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda dikenakan tarif 25%. Penyederhanaan ini juga mencakup pengecualian bea masuk tambahan (BMT) untuk delapan komoditas tersebut, meskipun tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%.

Chotibul menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Sebagai ilustrasi, penerimaan bea masuk dan pajak impor dari barang kiriman pada 2024 mencapai Rp1,7 triliun, dengan Rp647 miliar berasal dari bea masuk dan Rp5 miliar dari bea masuk tambahan. Relaksasi tarif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat proses kepabeanan tanpa mengurangi pendapatan negara secara signifikan.

Volume barang kiriman mengalami penurunan dari 61 juta paket pada 2022 menjadi 45 juta pada 2023 akibat pengetatan

aturan impor dari e-commerce. Pada 2024, jumlahnya hanya mencapai 5,8 juta. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan proses impor barang kiriman dapat lebih lancar dan memberikan manfaat bagi konsumen serta pelaku usaha.

Pelindo Manfaatkan MUFFEST 2025 untuk Perluas Pasar



Sebanyak 12 usaha mikro dan kecil (UMK) binaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memanfaatkan ajang Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2025 sebagai wadah untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Departemen Head TJSL Pelindo Febrianto Zenny menyatakan bahwa partisipasi UMK binaan Pelindo di ajang MUFFEST 2025 merupakan bentuk nyata dukungan perusahaan terhadap pertumbuhan usaha kecil. Pelindo tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas agar UMK dapat beradaptasi dengan tren industri dan meningkatkan kualitas produk mereka.

Festival yang berlangsung pada 20–23 Februari di Hall A, Jakarta Convention Center (JCC), menjadi kesempatan bagi UMK untuk menampilkan produk unggulan mereka di panggung modest fashion nasional. Keikutsertaan UMK binaan Pelindo dalam MUFFEST 2025 merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan

lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan UMK agar lebih kompetitif.

Sebanyak 12 UMK tersebut menampilkan beragam produk, mulai dari busana muslim, kerajinan tangan, perhiasan, hingga parfum. Selama penyelenggaraan MUFFEST 2025, UMK binaan Pelindo mendapatkan respons positif dari pengunjung, termasuk potensi kerja sama dengan berbagai pelaku industri fesyen dan ritel. Ajang ini menjadi peluang besar bagi mereka untuk menjajaki kemitraan baru dan memperluas jaringan bisnis.

MUFFEST 2025 yang memasuki tahun ke-10 mengusung tema "Connecting in Style." Festival ini menghadirkan lebih dari 130 brand serta desainer modest fashion, dengan berbagai produk mulai dari tekstil, busana muslim siap pakai, kosmetik, hingga produk halal lifestyle dan food and beverage (F&B). Selain pameran dan fashion show, acara ini juga menggelar berbagai seminar dan diskusi mengenai perkembangan industri fashion muslim di Indonesia.

Sebagai salah satu negara dengan pasar modest fashion terbesar di dunia, Indonesia terus mendorong industri ini agar lebih berdaya saing di tingkat global. Keikutsertaan UMK dalam ajang seperti MUFFEST menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri kreatif berbasis fesyen muslim. Pelindo berkomitmen untuk terus mendampingi UMK agar mereka bisa menjaga momentum pertumbuhan dan memperluas jangkauan pasar, baik di dalam maupun luar negeri.

**Revisi Aturan Impor Tekstil,
Pemerintah Prioritaskan Perlindungan
Industri Lokal**



Pemerintah saat ini sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa revisi ini terutama difokuskan pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), khususnya terkait impor pakaian jadi.

Proses revisi masih dalam tahap pembahasan bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait. Menurut Budi, kesepakatan antar pihak diperlukan sebelum aturan baru dapat diberlakukan. Ia berharap revisi ini dapat segera diselesaikan agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif dalam mendukung industri dalam negeri.

Menanggapi anggapan bahwa Permendag 8 menjadi penyebab tekanan bagi industri tekstil hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), Budi menegaskan bahwa revisi aturan ini bertujuan untuk melindungi industri lokal dari gempuran produk impor. Ia juga menyebut bahwa kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap untuk memastikan dampaknya tetap positif bagi sektor tekstil nasional.

Meskipun belum ada kepastian mengenai kapan revisi ini akan selesai, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikannya secepat mungkin demi menjaga keseimbangan antara kebijakan impor dan keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

Industri Tekstil Terpukul, Ribuan Pekerja Sritex Terkena PHK

Empat pabrik tekstil yang bernaung di bawah Sritex Group di Jawa Tengah resmi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 10.965 pekerja sepanjang Januari hingga Februari 2025. Keputusan ini diambil setelah perusahaan dinyatakan pailit, dan pemerintah berupaya memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Mengacu pada data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah yang diperoleh dari kurator pengadilan niaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebutkan bahwa pada Januari 2025, PT Bitratex Industries Semarang telah memutuskan hubungan kerja dengan 1.065 karyawan. Kemudian, pada 26 Februari 2025, PHK terjadi di beberapa pabrik lainnya, yaitu PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 pekerja, PT Primayudha Mandirijaya Boyolali (956 pekerja), PT Sinar Pantja Djaja Semarang (40 pekerja), dan tambahan PHK di PT Bitratex Industries Semarang sebanyak 104 pekerja.

PT Sinar Pantja Jaya Semarang sendiri telah melakukan PHK sejak Agustus 2024, sebelum PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Hingga saat ini, masih ada sekitar 300 pekerja yang belum menerima hak pesangonnya.

Sejak perusahaan diputus pailit oleh pengadilan niaga, kendali sepenuhnya berada di tangan kurator. Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen membela hak-hak buruh agar tetap mendapatkan hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Sumarno, menjelaskan bahwa pekerja yang terkena

PHK terakhir bekerja pada 28 Februari 2025 sebelum pabrik ditutup pada 1 Maret 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama manajemen telah berupaya menghindari PHK, namun keputusan akhir tetap berada di tangan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Dalam surat yang diterima karyawan Sritex, tim kurator yang terdiri dari Denny Ardiansyah, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin menyatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 serta putusan kasasi Mahkamah Agung pada 18 Desember 2024, keempat perusahaan yang tergabung dalam Sritex Group resmi dinyatakan pailit.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pekerja yang bekerja pada debitor memiliki hak untuk memutus hubungan kerja. Begitu pula, kurator dapat melakukan pemberhentian karyawan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya.

Kebangkrutan Sritex dinilai sebagai dampak dari kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Hal ini tidak hanya berdampak pada ribuan pekerja, tetapi juga memengaruhi ekosistem ekonomi kecil di sekitarnya. Industri tekstil di Indonesia sendiri sedang menghadapi tantangan besar, termasuk banjirnya produk impor yang lebih murah dan kompetitif.

Kabar mengenai PHK besar-besaran ini telah ramai diperbincangkan di media sosial sejak 26 Februari 2025. Banyak unggahan dari karyawan Sritex yang saling mengucapkan perpisahan, bahkan beberapa membubuhkan tanda tangan di seragam kerja sebagai bentuk kenangan.

Secara umum, industri tekstil nasional mengalami penurunan pesanan yang signifikan. Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional, Iwan Kusmawan, menjelaskan bahwa sejak pandemi Covid-19, pabrik-pabrik tekstil di Indonesia sulit bersaing dengan serbuan barang impor. Selain itu, belum jelas apakah pemerintah akan memberikan stimulus bagi industri padat karya dan bagaimana mekanisme aksesnya.

Ekonom Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai bahwa industri tekstil padat karya di Indonesia menghadapi tantangan besar yang berujung pada banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan melakukan PHK massal. Salah satu penyebab utama adalah kebijakan ekspor dan impor yang kurang berpihak pada industri dalam negeri.

Banjirnya produk tekstil murah dari China dan Vietnam membuat produsen lokal semakin terjepit, ditambah dengan lemahnya pengawasan terhadap impor ilegal dan pakaian bekas. Di sisi lain, ketergantungan pada bahan baku impor semakin memperburuk kondisi industri tekstil, terutama ketika nilai tukar rupiah melemah.

Regulasi ketenagakerjaan yang ketat serta kenaikan upah minimum juga menjadi tekanan bagi perusahaan, terutama di tengah daya beli masyarakat yang cenderung lesu. Pemerintah dinilai belum mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang mendukung industri tekstil nasional agar lebih kompetitif.

Selain faktor eksternal, industri tekstil dalam negeri juga menghadapi tantangan internal seperti rendahnya efisiensi operasional. Beberapa pabrik masih menggunakan teknologi lama yang menyebabkan biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing luar negeri. Kurangnya inovasi dan diferensiasi produk membuat produk lokal

sulit bersaing di pasar domestik maupun global.

Tanpa adanya modernisasi dan strategi bisnis yang lebih adaptif, industri tekstil Indonesia dikhawatirkan semakin tertinggal. Insentif berupa keringanan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, peningkatan manfaat uang tunai Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dianggap lebih berorientasi pada perlindungan tenaga kerja daripada peningkatan daya saing industri secara keseluruhan. Jika tidak ada langkah strategis yang konkret, industri tekstil nasional akan terus menghadapi tekanan berat di masa mendatang.

Luhut Pastikan Industri Tekstil Masih Punya Masa Depan



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa industri tekstil di Indonesia belum memasuki masa senja. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Jumat (28/2/2025), menanggapi kekhawatiran publik terkait penurunan kinerja sektor tekstil di tengah maraknya impor produk luar negeri.

Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga daya saing industri tekstil nasional. "Kami sudah menyiapkan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri tekstil. Ini bukan industri yang akan mati, justru ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan," ujar Luhut.

Salah satu bukti yang disampaikan adalah meningkatnya investasi di sektor tekstil dan garmen. Data terbaru menunjukkan bahwa beberapa perusahaan asing masih tertarik menanamkan modal di Indonesia, terutama dengan adanya kebijakan insentif fiskal serta kemudahan perizinan.

Selain itu, ekspor produk tekstil Indonesia ke berbagai negara juga menunjukkan tren positif. "Permintaan global masih tinggi, dan kita harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan meningkatkan kualitas serta inovasi produk dalam negeri," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah terus mengawasi arus impor tekstil guna melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak sehat. Regulasi mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan bea masuk tambahan sedang dikaji untuk memastikan perlindungan yang lebih optimal bagi produsen dalam negeri.

Luhut juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam sektor tekstil. Menurutnya, adopsi teknologi baru seperti otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan daya saing industri di pasar global.

Dengan berbagai langkah ini, Luhut optimistis industri tekstil nasional akan terus berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional.